

## Pilwu Serentak di Kab. Cirebon Tetap Digelar Tahun Ini

**CIREBON (IM)**- Tahun ini Kabupaten Cirebon sepakat untuk tetap melaksanakan Pemilihan Kuwu (Pilwu) secara serentak. Pilwu serentak di Kabupaten Cirebon mengacu kepada rapat persiapan pelaksanaan Pilwu beberapa waktu lalu, demikian dikatakan Kadis DPMD Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana, Kamis (19/1). Menurutny, beberapa hal pun dibahas untuk memastikan pelaksanaan Pilwu di Kabupaten Cirebon. Hal itu supaya tidak mengganggu jadwal pelaksanaan Pemilu Nasional yang tahapannya juga sebagian sudah digelar di 2022 dan di 2023.

Dia menjelaskan, pihaknya mengacu kepada surat edaran Kemendagri Nomor 100.3.5.5/244/SJ tanggal 14 Januari 2023. Isinya, perihal Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada masa Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Intinya, menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa dapat dilakukan sebelum tanggal 1 November 2023.

“Hasil rapat tadi akan diba-

wa ke rapat dengan Forkopimda. Namun intinya disepakati jika Pilwu tetap digelar tahun ini dengan beberapa penyesuaian karena digelar ditahun politik,” ungkapnya.

Erus menyebutkan, ada 100 Kuwu yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun ini. Rinciannya, ada 90 desa masuk dalam wilayah hukum Polres Kota Cirebon dan 10 desa pada wilayah hukum Polres Cirebon Kota. “Kalau Pilwu terakhir itukan masih diberlakukan PPKM. Nah sekarang sudah dicabut sehingga kemungkinan tidak ada pembatasan seperti dulu dan dikembalikan lagi polanya seperti sebelum pandemi,” ungkapnya.

Sementara itu, Anggota komisioner Kabupaten Cirebon, Apendi menjelaskan, waktu kehadiran KPU pada rapat Pilwu, bukan dalam kapasitas menyetujui atau menolak pelaksanaan Pilwu. KPU hanya memberikan gambaran pelaksanaan Pemilu yang digelar dari mulai tahapan di 2022 dan 2023. ● **pra**

## Petambak Udang Indramayu Beralih Budi Daya Rumput Laut

**INDRAMAYU (IM)**- Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla) Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, menyatakan banyak petambak udang beralih budi daya rumput laut, dan ikan nila, karena lebih menguntungkan serta biaya produksi terjangkau. “Produksi udang kami menurun, karena para petambak lebih memilih beralih membudidayakan rumput laut dan ikan nila,” kata Kepala Bidang Perikanan Budidaya Diskanla Kabupaten Indramayu, Dewi Sri Hartati di Indramayu, Kamis (19/1), melalui sambungan telepon.

Dewi mengatakan produksi udang di Kabupaten Indramayu pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup drastis, di mana dalam setahun produksi hanya berkisar 75.515 ton untuk udang vaname dan windu.

Sedangkan pada tahun 2021 lalu, lanjut Dewi produksi udang baik jenis vaname maupun windu di daerah itu mencapai 119.305 ton, dari 14 kecamatan penghasil ikan budi daya air payau.

Ia menjelaskan penurunan produksi udang tersebut, dikarenakan para petambak atau pembudidaya beralih ke komoditas lainnya, seperti rumput laut maupun nila, karena biaya produksi udang cukup tinggi bila dibandingkan lainnya.

“Untuk produksi udang vaname dari tahun 2021 mencapai 102 ribu ton, pada tahun 2022 mengalami penurunan, di mana produksi dalam setahun hanya 58 ribu ton, sedangkan produksi udang windu masih relatif sama yaitu 16 ribu ton,” tuturnya.

Menurutnya budi daya udang vaname selain membutuhkan biaya yang tinggi, juga risiko kematian cukup tinggi, namun untuk harga sendiri memang relatif lebih mahal di banding udang lainnya.

Dewi menambahkan dengan risiko yang cukup besar, maka para petambak udang lebih memilih beralih ke budi daya rumput laut, ikan nila dan lainnya, di mana risikonya lebih rendah serta harga sedang mengalami peningkatan. ● **pra**



IDN/ANTARA

### PERMASALAHAN PENGANGKUTAN SAMPAH KOTA BANDUNG

Warga melintas di samping tumpukan sampah di Jalan Burangrang, Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/1). Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung mencatat, setiap harinya Kota Bandung menghasilkan 1.200 ton sampah dan hanya bisa diangkut 900 hingga 1.000 ton per hari karena adanya permasalahan pengangkutan ke TPA Sarimukti dalam seminggu terakhir.

## Sejumlah Mata Air di Bandung Bakal Dijadikan Objek Wisata

**BANDUNG (IM)**- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menginventarisir sejumlah mata air yang ada di Kota Bandung, Jawa Barat, guna dijadikan sebagai tempat wisata ruang terbuka hijau.

Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengatakan setelah mata air bernama Seke Buka Tanah di Kecamatan Ujungberung diresmikan, ada beberapa mata air lagi yang akan dioptimalkan menjadi ruang publik. Salah satunya di kawasan Talagapasar dan beberapa tempat lainnya.

“Kami menitipkan tempat ini kepada pihak kewilayahan untuk menjaga sumber mata air yang juga sangat dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita di hilir. Sebab, tanpa mata air, hanya akan menjadi air mata,” kata Yana di Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/1).

Dengan dijadikan ruang publik, aset-aset itu bisa mendatangkan manfaat ekosistem

untuk Kota Bandung. Karena, mata air itu bisa diperlihara jika menjadi ruang publik. “Karena memang dulu dari literatur yang kita baca, mata air di Kota Bandung ini semakin berkurang banyak. Beberapa faktornya terjadi karena dampak dari pembangunan,” kata dia.

Untuk itu, ia mengajak masyarakat turut melestarikan mata air. Sehingga menurutnya pelestarian itu bisa mendatangkan manfaat bagi anak dan cucu kelak. “Semoga dengan hadirnya ruang publik ini bersama dengan konservasi seke (mata air), indeks kebahagiaan masyarakat bisa semakin meningkat,” kata Yana.

Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM), Didi Ruswandi mengatakan pembangunan mata air menjadi ruang publik menjadi salah satu upaya konservasi alam. ● **pra**

# 8|Nusantara



IDN/ANTARA

### PERESMIAN GEDUNG BARU DI RSUD KOTA BOGOR

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (kedua kanan) berbincang dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (ketiga kiri) dan Wali Kota Bogor Bima Arya (kanan) saat peresmian Gedung Blok I dan IV di RSUD Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (19/1). Gedung Blok I dan IV RSUD Kota Bogor tersebut akan digunakan sebagai Instalasi Gawat Darurat (IGD), poliklinik, radiologi dan ruang operasi dengan kapasitas sebanyak 42 tempat tidur dan mulai dioperasikan pada bulan Februari 2023.

# Ground Breaking Jalan Khusus Tambang Masih Terganjil OSS

Mudah-mudahan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS turun minggu ini, hingga di akhir Bulan Januari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melakukan ground breaking di Cigudeg atau Rumpin, kata Plh Bupati Bogor, Burhanudin.

### CIBINONG (IM)

Rencana ground breaking atau peletakan batu pertama pembangunan jalan khusus tambang sepanjang 12,5 Km Cigudeg-Rumpin masih menunggu turunnya perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single

Submission (OSS).

“Mudah-mudahan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau OSS turun minggu ini, hingga di akhir Bulan Januari Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil melakukan ground breaking di Cigudeg atau Rumpin,” kata

Plh Bupati Bogor, Burhanudin kepada wartawan, Kamis (19/1) saat ditanya soal perkembangan pembangunan jalan khusus tambang.

Burhanudin menuturkan bahwa rencana pembangunan jalan khusus tambang yang dijanjikan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil merupakan kebutuhan masyarakat sekitar usaha tambang, hingga masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemprov Jawa Barat.

“Di akhir masa jabatan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, Pemprov melalui PT Jasa Sarana, dibantu Jayabaya Grup pun akan membangun jalan khusus tambang.

Semoga dengan adanya jalan khusus tambang tersebut, mengurangi angka kecelakaan lalu lintas, jalan yang berdebu hingga banyak masyarakat terkena penyakit Inspeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) dan dampak negatif lainnya,” tutur Burhanudin.

Ia menjelaskan, bahwa selama ini sekitar 3.000 unit kendaraan khusus tambang perharinya telah menggunakan jalan desa, kabupaten dan provinsi hingga memperpendek usia layanan jalan tersebut.

“Jalan umum cepat rusak, hingga merugikan pemerintah desa maupun daerah karena Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), terus

menerus dipergunakan untuk membangun jalan yang sama,” jelasnya.

Burhanudin menambahkan, bahwa jalan khusus tambang akan dikelola oleh PT BSS, Jayabaya Grup dan konsorsium usaha tambang, di mana di Kecamatan Cigudeg dan Kecamatan Rumpin, ada sekitar 40 usaha tambang.

“Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bogor PT Prayoga Pertambangan Energi juga rencananya akan ikut mengelola jalan khusus tambang, karena Pemkab Bogor juga akan berinvestasi di jalan khusus tambang yang rencananya bakal menelan biaya hingga Rp 600 miliar,” tambah Burhanudin. ● **gio**

## Dishub Bandung Imbau Pengelola Tunda Penyesuaian Tarif Parkir

**BANDUNG (IM)**- Pengelola parkir di luar badan jalan atau off street di Kota Bandung, diimbau untuk menunda kenaikan tarif parkir. Dasar hukum terkait hal tersebut, kini tengah dalam tahap proses. Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung, Khairul Rijal mengatakan, alasan penundaan tarif parkir lantaran Kota Bandung menduduki urutan pertama kenaikan inflasi di bulan ini.

“Beberapa langkah strategis yang diambil, melakukan penundaan terhadap penyesuaian tarif parkir off street yang baru kita berlakukan pada 11 Januari kemarin,” kata Khairul Rijal, Kamis (19/1).

Menurut Khairul Rijal, tarif yang berlaku saat ini adalah berdasarkan Keputusan Wali Kota Bandung No 551/Kep.3132-Dishub/2022 tentang penyesuaian tarif parkir di luar badan jalan di Kota Bandung. Rijal menyebut, bahwa Kepwal tersebut telah mencabut Perwal 1005 Tahun 2014 tentang harga sewa di luar badan jalan. Sehingga Kepwal yang berlaku tetap men-

gacu kepada Kepwal 2022. “Jadi saat ini yang berlaku, memang Keputusan Wali Kota Bandung tanggal 1 Desember 2022 yang kemarin baru kita sosialisasikan dan mulai diberlakukan 11 Januari,” ucapnya.

Dikemukakan Rijal, saat ini beberapa pengelola parkir off street sudah memberlakukan tarif baru atau melakukan penyesuaian tarif. Namun ada pula pengelola parkir yang melakukan penundaan. “Kita telah mengimbau asosiasi pengelola pusat belajar Indonesia (APPBI), silahkan gunakan tarif parkir lama dahulu. Di lapangan ada yang menunda, dan ada yang masih memberlakukan,” ujar dia.

Bagi mereka yang telah memberlakukan penyesuaian tarif, dikatakan Rijal tidak ada sanksi yang dikenakan. Akan tetapi, apabila aturan soal penundaan penyesuaian tarif berlaku, maka harus ditaati. “Jadi kita mengimbau kepada pengelola parkir untuk sementara ditunda dahulu penyesuaian tarif. Penundaan ini, ya sampai inflasi di Kota Bandung bisa dikendalikan kembali,” tandasnya. ● **pra**

## Bobby Semprot 2 Kadis Gegara Serapan Anggaran Rendah

**MEDAN (IM)**- Wali Kota Medan, Bobby Nasution menyemprot dua kepala dinas karena serapan anggaran di dua dinas tersebut rendah. Dua dinas yang disemprot Bobby adalah Dinas PU serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

“Saya pengen tidak ada lagi 2023 ini proyeknya yang terlambat, Dinas PU, Dinas Perkim, hari ini anggarannya paling besar di Pemkot Medan. Ini tahu diri juga, sudah anggarannya paling besar,” kata Bobby dalam sambutan di acara rapat kerja di Medan, Kamis (19/1).

Bobby marah-marah di hadapan ratusan pejabat Pemkot Medan, mulai kadis hingga lurah se-Kota Medan. Bobby mengatakan rendahnya serapan anggaran membuat wilayahnya selalu diumumkan sebagai 15 besar terbawah dalam penyerapan anggaran.

“Ini kalau Medan diumumkan terus satu Indonesia dengan kita peringkat 15 terbawah terus, ini berarti tidak tahu diri dinas-dinas ini, Pak, sudah dikasih anggaran paling besar, yang gini-gini, Pak Ben, tolong dimasukkan ke kontrak kerja,” ungkapnya.

Bobby mendorong agar jajarannya mempercepat proses lelang untuk memperbaiki serapan anggaran di dua dinas tersebut, sehingga tidak ada lagi proyek yang pengerjaannya melebihi tahun anggaran.

“Yang kerjanya di atas enam bulan, itu bulan tiga harus sudah kontrak harus sudah kerja, jangan bulan tiga baru lelang, nanti ditanya kok belum (lelang), alasannya gagal lelang, jadi pengerjaan di atas enam bulan harus sudah kontrak bulan tiga. Jadi kalau pun ada pengerjaan yang terlambat, tidak lewat-lewat tahun lagi dan masih di tahun yang sama,” ujarnya. ● **pra**

### BOGOR (IM)

Izin pertambangan di Kabupaten Bogor masih berada di kewenangan Pemerintah Pusat. Namun, kini setelah moratorium dicabut maka dikembalikan ke Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemprov) Jabar. Oleh karena wilayah pertambangan berada di Kota/Kabupaten se Jabar, maka Pemprov Jabar dan Pemkab Bogor melakukan penyuluhan pertambangan bagi para pengusaha tambang.

Hal ini sebagai bentuk dalam rangka menggerakkan usaha pertambangan. Pemprov Jabar dan Pemkab Bogor pun bersama-sama melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap izin para pelaku usaha tambang, guna menciptakan iklim investasi yang kondusif di Kabupaten Bogor. Salah satunya dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi Pelayanan Perizinan Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berlangsung di Gedung Serbaguna I Setda, Rabu (16/1) lalu.

Untuk diketahui, saat ini pendelegasian kewenangan berkaitan perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara, telah dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Provinsi seluruh Indonesia. Kewenangan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di

Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum menjelaskan bahwa kewenangan perizinan usaha bidang tambang mineral dan batubara telah diserahkan dan diberikan kepada Pemprov Jabar. “Maka kami melaksanakan amanah tersebut melalui sosialisasi dan inventarisasi sehingga para pengusaha paham tentang apa yang diharapkan penertibin ini,” ujarnya.

Langkah awal yang dilakukan, salah satunya melalui pembentukan Satuan Tugas di masing-masing kabupaten/kota. Karena wilayah Jabar yang luas maka dirinya ingin dibantu oleh Bupati dan Wali Kota se-Jabar untuk menindaklanjuti dengan cara membentuk Satgas.

“Satgas ini nantinya akan merekomendasikan kepada kami, bagaimana kondisi perusahaan yang ada di masing-masing wilayah,” katanya.

Ia juga mengaskan kepada perusahaan yang ilegal untuk segera meleagalkan. Begitu juga dengan perusahaan yang legal tapi belum memenuhi syarat ia akan memberikan tegang waktu sampai tiga bulan, sebelum ia bersama Satgas bergerak menginventarisir perusahaan tersebut.

“Saya juga minta kepada masyarakat jika memang menemukan tambang ilegal maka segera laporkan kepada kami.



IST

Pemprov Jabar dan Pemkab Bogormelakukan Pengawasan Usaha Pertambangan.